

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pengeluaran pemerintah adalah langkah guna mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun disisi lain, beberapa negara terutama di Uni Eropa tidak sependapat (Larch & Lechthaler, 2013). Studi teoritis maupun empiris, banyak memperdebatkan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Kontroversi utama menurut Sodik (2007) adalah apakah sektor publik memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara umum, gambaran pengeluaran sektor publik yang mencakup infrastruktur fisik atau *human capital* dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga dapat memperlambatnya terutama yang berhubungan dengan pengeluaran keuangan. Dampaknya bergantung pada keseimbangan antara pengeluaran publik yang produktif dan efek distorsi pajak.

Arpaia & Turrini (2007) mengidentifikasi dua kategori utama masalah yang relevan dengan kebijakan. Kategori pertama berkaitan dengan perdebatan mengenai keberlanjutan keuangan publik di Uni Eropa. Hal ini juga bermanfaat untuk menilai dampak perubahan struktural dalam pertumbuhan terhadap pengeluaran pemerintah dan defisit anggaran. Kategori kedua menyoroti peran penting dari penyusunan standar untuk mengevaluasi kebijakan pengeluaran serta kebijakan fiskal secara keseluruhan.

Pendapatan nasional sebagian besar ditopang oleh pengeluaran pemerintah, namun dampaknya tidak selalu positif. Usman & Loganathan (2015) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memiliki dua efek yang berlawanan. Di satu sisi, pengeluaran ini mampu meningkatkan *output* secara signifikan. Namun, disisi lain pengeluaran tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti menekan investasi swasta dan menghambat kinerja ekonomi secara keseluruhan terutama jika pengeluaran ini dibiayai melalui peningkatan pajak atau pinjaman. Marratin & Salotti (2011)

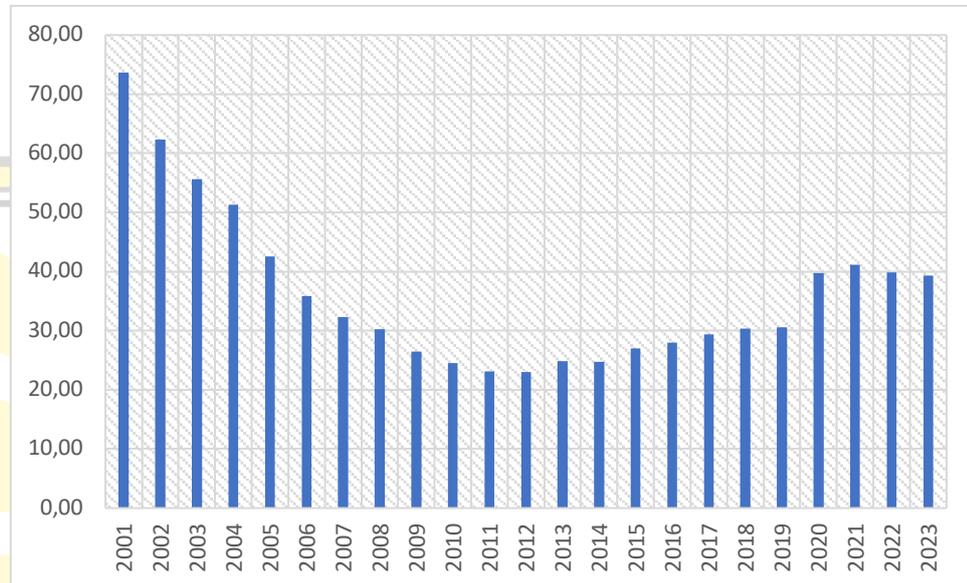
menambahkan bahwa peningkatan pengeluaran atau konsumsi pemerintah dapat memicu kenaikan nilai bersih dari pajak yang pada akhirnya mengurangi pendapatan permanen. Dampak ini juga berpotensi menyebabkan penurunan konsumsi swasta dan peningkatan ketersediaan tenaga kerja, yang membawa konsekuensi negatif bagi perekonomian.

Teori Wagnerian menyatakan bahwa peningkatan pendapatan nasional akan mendorong peningkatan belanja pemerintah. Di sisi lain, teori makro Keynesian berpendapat bahwa belanja pemerintah yang lebih tinggi cenderung meningkatkan permintaan agregat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, pandangan ini tidak sejalan dengan pendekatan aliran neo-klasik. Menurut perspektif ini, peningkatan pengeluaran pemerintah justru dapat menghambat kinerja ekonomi secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena untuk membiayai belanja yang lebih tinggi, pemerintah sering kali harus meminjam dana atau menaikkan pajak, yang dapat berdampak negatif pada perekonomian (Usman & Loganathan, 2015).

Teori Wagnerian berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan porsi pengeluaran pemerintah dalam produk nasional bruto (Kumar dkk., 2012). Sementara itu, menurut Keynes terdapat hubungan kausal yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, dimana keduanya saling mempengaruhi dan menjadi faktor utama dalam mendorong dinamika ekonomi (Larch & Lechthaler, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli, seperti Dudzevičiūtė dkk. (2018), Sodik (2007), Usman & Loganathan, (2015), Alexiou (2009), Chimobi (2009), Farzanegan (2014), Al-Fawwaz (2015), Devarajan dkk. (1996), serta Mohammadi & Ram (2015), menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan utama. Kelompok pertama, yaitu Keynesian berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh belanja pemerintah. Sebaliknya, kelompok kedua yaitu Wagnerian, melihat bahwa pengeluaran pemerintah justru merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa bukti juga menunjukkan adanya hubungan dua arah, di mana

pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah saling mempengaruhi, mendukung teori kausalitas dua arah sebagaimana diungkapkan oleh Usman dan Loganathan (2015).



Sumber: *BPS*

Gambar 1. 1 Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB (Persen) di Indonesia

Dalam dua dekade terakhir, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada periode 2001 hingga 2012, rasio ini mengalami penurunan dari 73,7% menjadi 23% sebagai dampak dari kebijakan pengelolaan fiskal yang lebih ketat serta pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Seiring dengan perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan. Sebagaimana negara lain di dunia yang terdampak pandemi COVID-19, pada tahun 2020-2023 rasio utang pemerintah terhadap PDB mengalami lonjakan signifikan untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi. Ini termasuk belanja untuk bantuan sosial (*bansos*), stimulus ekonomi, dan dukungan kepada sektor-sektor yang terdampak. Kondisi ini dianggap menjadi penyebab pengeluaran pemerintah Indonesia sering kali lebih besar daripada pendapatan negara, menyebabkan defisit anggaran yang perlu dibiayai melalui utang

pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah berusaha menjaga keseimbangan fiskal dengan berfokus pada pengelolaan utang yang bijaksana.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan dinamis antara kedua variabel tersebut guna memahami bagaimana pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada pengeluaran pemerintah. Untuk menjawab pertanyaan ini, metode *Vector Error Correction Model* (VECM) digunakan sebagai pendekatan analisis.

Metode VECM dipilih karena mampu menangkap hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel-variabel yang dianalisis dalam data *time series*. Metode ini memungkinkan pengujian kointegrasi antar variabel, yang berguna untuk mengidentifikasi adanya hubungan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di berbagai periode. Selain itu, VECM juga dapat mengungkap hubungan kausalitas dalam jangka pendek, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara kedua variabel tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan fiskal dan perencanaan ekonomi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada jangka panjang dan jangka pendek?
- b. Bagaimana efek *shock* pada pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi melalui analisis *Impulse Response Function* (IRF)?
- c. Bagaimana kontribusi pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi melalui analisis *Variance Decomposition* (VD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada jangka panjang dan jangka pendek.
- b. Untuk mengetahui efek *shock* pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui analisis *Impulse Response Function* (IRF).
- c. Untuk mengetahui kontribusi variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi melalui analisis *Variance Decomposition* (VD).

